

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era pembangunan seperti yang sedang dialami di Indonesia, tenaga kerja menyumbang peranan atas pertumbuhan ekonomi pada negara karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan memberikan dampak tersendiri dalam tumbuh kembang pembangunan suatu negara dan bisa jadi menjadi cermin bagi negara terkait atas tingkat kemakmuran yang dimiliki dimana dari hal tersebut dapat dijadikan pengukuran atas pendapatan perkapita negara. Berdasarkan data proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai sekitar 265 juta jiwa, dengan penduduk yang memasuki usia produktif mencapai 179,13 juta jiwa atau sekitar 67,6 %. Dengan jumlah sumber daya manusia sangat banyak di Indonesia, akan dapat diprediksi bahwa akan timbul masalah mengenai banyaknya jumlah penduduk tersebut, yang paling utama tentu saja adalah masalah pengangguran. Salah satu upaya yang telah dikenal dan merupakan alternatif untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja adalah dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Pasar kerja di luar negeri menjadi alternatif bagi tenaga kerja dan atau pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, dengan adanya pasar kerja luar negeri, muncul motivasi yang mendorong bekerja di luar negeri, dengan alasan sebagian besar karena faktor ekonomi dan sulitnya mendapat pekerjaan di dalam negeri serta pencari kerja ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka

melalui bekerja di luar negeri (Pratiwi, Wijaya, & Rozikin, 2012). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kemudian diubah penyebutannya menjadi Pekerja Migran Indonesia mengikuti perubahan Undang-undang dari UU No.39 Tahun 2004 menjadi UU No.18 Tahun 2017 setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja Migran Indonesia pantas disebut sebagai pahlawan negara karena besarnya jumlah devisa yang dihasilkan untuk negara. Menurut data yang didapatkan dari BNP2TKI, Indonesia pada tahun 2018 menempatkan sebanyak 264.092 Pekerja Migran Indonesia. Dengan jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu cara yang potensial dalam mengurangi pengangguran.

Meskipun peluang kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia terbuka lebar, namun tetap saja muncul kendala dan keprihatinan yang seringkali didengar terhadap Pekerja Migran Indonesia. Tidak semua Pekerja Migran Indonesia yang berkerja di Luar Negeri mendapat perlakuan yang sesuai apa yang diharapkan dan sering terdengar informasi dari media masa adanya Pekerja Migran Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi seperti adanya kasus penganiayaan, dihukum berlebihan, pemulangan paksa, gaji tidak dibayar bahkan sampai terjadi kasus pembunuhan. Meskipun dengan intensitas yang terbilang masih kecil, namun kasus-kasus tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat akan jaminan keamanan untuk bekerja di luar Negeri. Berdasarkan data laporan BNP2TKI tahun 2018, terdapat sebanyak 4.678 permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang diajukan pada

tahun 2018. Permasalahan yang paling banyak diantaranya adalah Pekerja Migran Indonesia yang tidak berdokumen dengan jumlah 441 orang, Pekerja yang ingin dipulangkan berjumlah 332 orang dan yang tidak dibayar sejumlah 226 orang. Rendahnya soft skill dari setiap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut dapat dijadikan suatu alasan mengapa permasalahan-permasalahan tersebut timbul. Para Pekerja Migran Indonesia perlu diberikan suatu pelatihan keterampilan agar tidak terkendala berbagai macam hambatan seperti rendahnya kemampuan maupun batasan bahasa yang bisa menimbulkan masalah jika hal ini tidak dimiliki oleh para Pekerja Migran Indonesia.

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia tidak berhenti saat proses pemberangkatan dan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga saat mereka pulang ke tanah air. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi problema klasik yang sering terjadi di kalangan para Pekerja Migran Indonesia sepulangnya ke tanah air, seperti: Pekerja Migran Indonesia cenderung tidak memiliki keahlian yang kompetitif; dan sebagian menghadapi masalah keluarga yang rumit pada pasca kembali ke dalam negeri; pola hidup hedonis menjadi fenomena di sering terjadi, khususnya mereka yang telah mengalami peningkatan status sosial-ekonomi. Kebanyakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, dan yang banyak terjadi adalah mereka lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan

usaha-usaha produktif yang dapat dimaksimalkan di masa depan apabila harus dipilih keputusan untuk meninggalkan dunia kerja di luar negeri.

Remitansi merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para Pekerja Migran Indonesia setelah mereka pulang dari kerjanya di luar negeri. Remitansi dapat didefinisikan sebagai pembayaran atau aliran atau transfer dana lintas batas negara dari orang ke orang, yang dalam prakteknya transfer dana tersebut dilakukan oleh para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, secara berulang kali. Dengan demikian, kepulauan para pekerja migran ini dapat dikatakan adalah proses dimana muncul pengaliran remitan terutama uang dari hasil bekerja di luar negeri ke berbagai daerah asal di Indonesia. Berikut data dari BNP2TKI mengenai remitansi di Indonesia periode 2015-2018 :

Tabel 1.1 Remitansi Indonesia Periode 2015-2018

No.	Tahun	Remitansi (Dalam US\$ Milyar)
1.	2015	9,42
2.	2016	8,85
3.	2017	8,76
4.	2018	10,97

Sumber : Laporan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BNP2TKI 2019

Menurut hasil penelitian Basrowi (2018), terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah remitan yang dikirimkan terhadap tingkat kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia purna, semakin tinggi tingkat remitan yang dikirim ke keluarganya semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia purna dan sebaliknya. Hal ini tentu berarti bahwa dengan adanya dana yang didapatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk penghasilan mereka, seharusnya dapat dipergunakan sebagai proses penanggulangan kemiskinan dan meraih kesejahteraan. Remitansi atau uang hasil kiriman pekerja migran menjadi

adalah salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup rumah tangga seorang pekerja migran dan dapat dilihat keberhasilan seorang Pekerja Migran Indonesia dari hal tersebut. Remitan secara langsung berperan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan juga berpotensi terhadap penciptaan peluang-peluang ekonomi baru. Permasalahan lain yang kemudian timbul adalah bagaimana pemanfaatan remitansi yang dikirimkan. Dengan dana dan modal yang berasal dari kerja di luar negeri, seharusnya para Pekerja Migran Indonesia mampu untuk menjadi produktif, seperti melalui jalur membangun wirausaha dan mengembangkan ekonomi keluarga. Tetapi, walaupun modal yang diperoleh telah cukup, tanpa dorongan keluarga dan keterampilan usaha yang cukup maka bukan tidak mungkin bagi para Pekerja Migran Indonesia untuk memutuskan kembali ke tanah rantau di luar negeri. Keterampilan membangun usaha dengan melihat potensi, peluang, modal, manajemen dan prospek yang baik akan sangat dibutuhkan bagi para Pekerja Migran Indonesia ini.

Melihat berbagai permasalahan di atas, salah satu cara mengatasinya adalah melalui sebuah pemberdayaan. Masyarakat disini perlu diarahkan kepada keberdayaan menghadapi permasalahannya dan diberikan suatu dorongan atau suatu bentuk kekuatan agar mampu membawa dirinya sendiri menuju kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, hasil akhir yang dapat dilihat adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya. Yang patut diperhatikan dari sebuah pemberdayaan adalah bahwa hal ini harus

dapat membawa masyarakat untuk mandiri. Mandiri disini adalah bahwa timbul kesadaran bahwa setiap individu, masyarakat atau suatu wilayah pasti memiliki suatu potensi, yang mana kemandirian yang ada akan mampu membawa seorang manusia untuk menggali potensi tersebut. Untuk memupuk kesadaran tersebut, peran pihak eksternal sangat penting, yang mana dalam suatu komunitas masyarakat, pemerintahlah yang harus berperan paling utama.

Mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak sudah diatur di dalam undang-undang dasar, akan tetapi, kondisi yang terjadi pada kenyataannya masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya seperti dapat dilihat dari masih kurangnya presentase masyarakat yang memiliki skill atau keterampilan yang dimiliki, khususnya bagi para Pekerja Migran Indonesia yang telah pulang setelah bekerja di luar negeri. Pemerintah tidak hanya bertugas mengurus perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia ini sebelum dan saat bekerja di luar negeri saja, namun juga setelah mereka kembali ke daerah asal. Bagi para Pekerja Migran Indonesia telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Pasal 24 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk perlindungan setelah bekerja bagi para Pekerja Migran Indonesia adalah dengan melalui Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Kondisi seperti ini, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang semestinya berusaha memperbaikinya melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi dan memberdayakan pekerja.

Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi Calon Pekerja

Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia Purna di desa yang menjadi pengirim Pekerja Migran Indonesia terbanyak dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2019 Tentang pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini bahwa peraturan inilah yang digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif. Kemudian pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk :

1. Mewujudkan terbentuknya komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif.
2. Memperluas Kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran.
3. Mewujudkan basis data pekerja migran Indonesia di tingkat desa.
4. Memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural.
5. Meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

6. Mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera.

Berdasarkan paparan tersebut, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya program Desa Migran Produktif ini adalah dapat memberi pilihan kepada para Pekerja Migran Indonesia, yakni yang pertama memanfaatkan skill dan kemampuan yang didapat dari program ini agar dapat mensejahterakan diri di kampung halaman dan mengurangi ketergantungan pada bekerja di luar negeri yang banyak memiliki resiko dengan memacu daya guna remitansi Pekerja Migran Indonesia untuk meningkatkan ekonomi desa, dengan mengubah pola pengelolaan keuangan dari konsumtif menjadi produktif. Terdapat suatu harapan dari pemerintah yang menyatakan bahwa tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai katup pengaman ketika peluang kerja di luar negeri sempit, sehingga setelah selesai masa kontrak diharapkan Pekerja Migran Indonesia akan memilih bekerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperolehnya untuk bekerja atau membuka usaha sendiri.

Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten di wilayah Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.386,05 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.568.113 jiwa. Di Kabupaten Kediri sendiri merupakan daerah yang menyumbang pasokan Pekerja Migran Indonesia yang cukup besar di Jawa Timur. Kabupaten Kediri memiliki desa-desa kantong Pekerja Migran Indonesia yang telah dijadikan sebagai Desa Migran Produktif. Upaya Pemberdayaan telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri selaku pihak yang memiliki tanggung jawab dalam

pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Pemberdayaan yang dilakukan adalah pelatihan-pelatihan kepada para Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan menumbuhkan semangat Kewirausahaan. Namun, pemberdayaan yang dilakukan dirasa kurang berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih ada Pekerja Migran Indonesia yang kembali mencari kerja ke luar negeri. Di Kabupaten Kediri sendiri, angka penempatan Pekerja Migran Indonesia itu sendiri masih mengalami kenaikan sejak tahun 2016 sampai 2019. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Kediri Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah Penempatan
1.	2016	2.426
2.	2017	3.625
3.	2018	4.145
4.	2019	4.027

Sumber : Laporan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BNP2TKI 2019

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa masih terdapat kenaikan angka pada jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun dan nilai konstan dari tahun 2018 ke 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya minat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia atau banyak masyarakat yang berpikir untuk mencari lapangan pekerjaan di luar negeri. Pekerjaan di luar negeri dirasa hal yang menggiurkan karena tidak adanya tuntutan skill dan keterampilan yang tinggi dan mampu mendatangkan penghasilan yang lumayan dibandingkan dengan pekerjaan di dalam negeri. Padahal Pemerintah sendiri sudah memberikan pilihan melalui pemberdayaan di desa-desa yang dipilih menjadi Desa Migran Produktif dimana

dengan adanya Pemberdayaan di daerah yang menjadi kantong-kantong penghasil Pekerja Migran Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat di desa kantong Pekerja Migran Indonesia untuk memanfaatkan potensi lokal daerahnya dan mampu memanfaatkan dana yang didapat dari luar negeri untuk memulai kegiatan produktif sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan yang cukup untuk mensejahterakan diri dan keluarga secara mandiri di daerah asal tanpa bergantung lagi pada pekerjaan di luar negeri.

Desa Bedali di Kecamatan Ngancar di Kabupaten Kediri merupakan salah satu desa kantong Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kediri. Menurut penuturan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Desa Bedali ditunjuk menjadi Desa Migran Produktif sejak tahun 2017 dengan dasar banyaknya jumlah pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia asal Desa Bedali. Dengan demikian jumlah Pekerja Migran Indonesia purna yang ada di Desa Bedali juga cukup banyak, karena sebagian warga usia produktif dari desa ini banyak yang mengadu nasib di negeri orang untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Peneliti menentukan Desa Bedali sebagai acuan untuk melihat pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri karena berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Desa Bedali sendiri memiliki angka jumlah penduduk yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia paling besar dibandingkan dengan Desa Migran Produktif lainnya di Kabupaten Kediri, yakni Desa Deyeng, Desa Duwet dan Desa Margourip. Hal tersebut dapat ditunjukkan berdasarkan Tabel berikut ini :

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa yang Bekerja Sebagai TKI/Pekerja Migran Indonesia dari Desa Migran Produktif di Kabupaten Kediri tahun 2018

No.	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Bedali	110	320	430
2.	Deyeng	98	286	384
3.	Duwet	30	170	200
4.	Margourip	29	43	72

Sumber : Data BPS Kabupaten Kediri yang telah Diolah Penulis, 2019

Di desa Bedali ini para Pekerja Migran Indonesia juga banyak mengalami permasalahan serupa, yaitu mengenai keterbatasan skill dan pengetahuan yang mereka miliki dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan dana yang mereka dapat dari luar negeri. Seperti yang disebutkan oleh kepala Desa Bedali bahwa :

“Kisah bagaimana banyak kiriman uang dari TKI yang langsung ludes untuk kebutuhan konsumtif ini memang kerap terjadi. Ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, pilihannya kalau tidak menjadi kuli bangunan adalah menjadi petani atau peternak. Seperti kampung TKI lainnya, masalah yang terjadi di desa adalah bagaimana membuat para mantan pekerja migran itu tetap bisa produktif setelah pulang ke Indonesia. Kalau bisa mereka enggan kembali ke luar negeri”. (<http://radarkediri.jawapos.com/read/2018/04/10/64043/ketika-dua-kampung-tki-menuju-desa-migran-produktif-1> . Diunggah tanggal 18 April 2018).

Menurut penelitian dari Astuti, Alfa, & Handayani (2019) mengenai pengembangan ekonomi lokal di Desa Bedali, Sampai dengan tahun 2018 jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna di Desa Bedali sudah sebanyak 450 orang. Banyak faktor yang menjadi penyebab permasalahan pada mayoritas masyarakat selaku Pekerja Migran Indonesia Purna di Desa Bedali sehingga dirasa pemberdayaan harus lebih diperhatikan. Hal tersebut diantaranya kurang keterampilan yang mereka miliki, adanya keengganan untuk membuka usaha mandiri di desa, serta adanya pemikiran bahwa uang yang diperoleh selama menjadi Pekerja Migran Indonesia cukup dibelikan tanah. Desa Bedali

merupakan desa yang berpotensi yaitu sebagai wilayah penghasil buah nanas di Kabupaten Kediri. Luas lahan nanas yang ada di desa Bedali hampir 75 hektar dan dimiliki oleh sebagian besar para Pekerja Migran Indonesia purna. Selama ini buah nanas tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa Bedali secara maksimal karena kurangnya keterampilan dalam pengolahan menjadi produk bernilai tinggi.

Bentuk upaya yang telah dilakukan adalah pelatihan para Pekerja Migran Indonesia Purna dengan membentuk kelompok yang dinamakan “Tenaga Kerja Mandiri Dahlia” yang terdiri dari 20 orang Pekerja Migran Indonesia Purna dalam satu kelompok tersebut. Kelompok ini telah diberi pelatihan untuk mampu memproduksi olahan nanas yaitu minuman sari nanas dengan nama produk “Nyess” yang memproduksi olahan nanas tersebut sesuai pesanan dengan sistem catering. Namun, meskipun demikian, masih muncul permasalahan terkait kesadaran para Pekerja Migran Purna ini, yang mana menurut penuturan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri dari jumlah tersebut, masih terdapat sekitar 50% anggota kelompok tersebut mulai enggan berproduksi dan memilih pekerjaan dengan gaji langsung seperti bekerja mengikuti orang lain atau pekerjaan bertani. Padahal, pendampingan telah dilaksanakan oleh Tenaga Kerja Sukarela dan Petugas Desmigratif sendiri dengan dilaksanakan pertemuan-pertemuan dengan para Pekerja Migran Indonesia Purna agar produksi tetap dijalankan sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka dari hasil produksi tersebut.

Dinas Tenaga Kerja merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pemberdayaan kepada para Pekerja Migran Indonesia Purna ini.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan ini adalah dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan. Lebih lanjut, dalam pasal 10 juga telah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan di Desmigratif ditunjuk petugas desmigratif sebagai fasilitator. Melihat kondisi ini, penulis merasa perlu adanya dukungan lebih dalam melakukan pemberdayaan kepada para Pekerja Migran Indonesia purna di Desa Bedali oleh pemerintah daerah yakni melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang timbul seperti yang telah dipaparkan diatas. Berdasarkan paparan permasalahan di atas, penulis ingin mendeskripsikan dan mengkaji penelitian dengan judul : **“Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Melalui Program Desa Migran Produktif oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan penulis adalah : “Bagaimana Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna melalui Program Desa Migran Produktif yang dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri dengan mengambil tempat di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?”

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin diraih penulis melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna melalui program Desa Migran Produktif yang dilakukan oleh

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri dengan mengambil tempat penelitian di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang ingin dicapai bagi mahasiswa, perguruan tinggi dan masyarakat, adapun manfaat Penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa.

Memberikan pendalaman dan pengembangan kemampuan di bidangnya serta memperoleh kemampuan praktis di lapangan serta mendapat pengetahuan lebih mengenai pemberdayaan khususnya yang dilakukan kepada para Pekerja Migran Indonesia purna di Desa Migran Produktif Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi di perpustakaan dan bahan bacaan yang berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya sebuah penelitian sejenis di masa mendatang, dan agar bisa dapat menjadi referensi di masa mendatang.

3. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri

Untuk memberikan masukan pemikiran dalam rangka meningkatkan keberhasilan kegiatan pemberdayaan khususnya yang dilakukan kepada para Pekerja Migran Indonesia purna.